

**ANALISIS KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN
PEMILU 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF
*SIYASAH SYAR'IYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANGGI FITRIANI PURWANINGRUM

18103070063

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The holding of elections in Indonesia since the first national elections in 1955 until the 2004 elections has marked an important stage in the history of democracy in this country, there have been ups and downs in the involvement of citizens in the implementation of elections. Central Lampung Regency is one of the regions holding the 2019 general election, where within one day of general elections in Indonesia, five elections are held simultaneously, namely the election of the President-Vice President, and legislator. Behind the successful implementation of elections in each region, there are various efforts made by the election implementing agencies which of course in their implementation do not come out of the applicable regulations, in other words, on the track. There are obstacles that occur in the implementation of the 2019 elections in Central Lampung Regency such as the geographical conditions of some areas that are difficult to reach, indigenous people who are less willing to accept change and do not participate in elections, and money politics practices that are not easily lost in society.

This thesis is a field research research, which is a research that is carried out systematically by raising the existing data in the field. The approach used is a juridical-empirical approach. Collecting data by direct observation and interviews with the parties concerned. This study aims to provide an overview of the analysis of the concept of good governance in the implementation of the 2019 elections in Central Lampung Regency and reviewed using the *siyasah syar'iyah* perspective.

The results of the study show that the 2019 elections in Central Lampung Regency in general are in accordance with the principles of good governance, but need to be emphasized again from the aspect of openness and public services. In addition, the implementation of the 2019 elections in Central Lampung Regency is in accordance with the *siyasah syar'iyah* principles, namely mandate, justice, obedience, and deliberation. But it has not reached the ideal mandate principle.

Keywords: *Election, Good Governance, Siyasah Syar'iyah.*

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu 2004 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarah demokrasi di tanah air ini, ada pasang surut pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Lampung Tengah termasuk daerah yang melaksanakan pemilu 2019, dimana dalam kurun waktu satu hari pemilu di Indonesia menjalankan lima pemilihan secara bersamaan yaitu pemilihan Presiden-Wakil Presiden, dan anggota Legislatif. Dibalik suksesnya pelaksanaan pemilu di tiap-tiap daerah, terdapat berbagai upaya yang dilakukan lembaga pelaksana pemilu yang tentu dalam pelaksanaannya tidak keluar dari aturan yang berlaku dengan kata lain *on the track*. Terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah seperti kondisi geografis beberapa daerah yang sulit dijangkau, masyarakat asli yang kurang mau menerima perubahan dan tidak berpartisipasi dalam pemilu, dan praktik politik uang yang tidak mudah hilang begitu saja di masyarakat.

Skripsi ini merupakan penelitian *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait analisis konsep *good governance* pada pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah dan ditinjau menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaannya secara umum sudah sesuai dengan asas *good governance*, namun perlu ditekankan kembali dari aspek keterbukaan dan pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*, yaitu amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Tetapi belum mencapai kepada prinsip amanat yang ideal.

Kata Kunci: *Pemilu, Good Governance, Siyasah Syar'iyah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Fitriani Purwaningrum
NIM : 18103070063
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH*" adalah hasil penelitian/ karya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2022 M

23 Rajab 1443 H

Saya yang menyatakan,



Anggi Fitriani Purwaningrum

NIM: 18103070063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Anggi Fitriani Purwaningrum

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggi Fitriani Purwaningrum
NIM : 18103070063
Judul : "Analisis Konsep *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif *Siyasah Syar'iyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Februari 2022 M
23 Rajab 1443 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 2



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI FITRIANI PURWANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070063
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

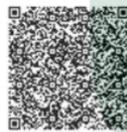
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 622ea0ff602cf



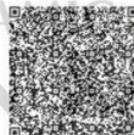
Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62230e27125c8



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 622bfc0ff2142



Yogyakarta, 02 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 622ead71effa0

MOTTO

“Minta-lah kepada Allah segala sesuatu kepada Allah, walaupun sekedar membenarkan tali sandal yang terputus, karena jika Allah tidak mempermudah, mustahil akan menjadi mudah”

Jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah yang memegang nasibmu. Kaya, pintar, cantik tidak menjamin nasibnya baik. Harapkan Ridho dan rahmatNya, selalu pegang syariat. Biarkan Allah dan RasulNya yang mengatur seluruh jalanmu.

_Anggi Fitriani Purwaningrum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

“Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Purwanto dan Ibu Nurul Hidayah yang senantiasa menyemangati dan memberikan doa terbaik tanpa henti. Dan taklupa saudara kembarku Wika Fitriana Purwaningtyas dan adikku M. Fathu Bahril Falah, serta kepada semua teman-teman seperjuangan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • الشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين•

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penulis peningkatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul akhir*. Amiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Konsep Good Governance Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Siyasa Syar’iyah**”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Drs. Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Gugun El Guyanie, S.H, L.L.M., selaku Sekretaris Program Hukum Tata Negara.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
8. Segenap staf Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah dan semua informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas segala kebaikan dan kesediaan bapak dan ibu dalam memberikan data serta waktunya.
9. Kepada Kedua orang tuaku, Bapak Purwanto dan Ibu Nurul Hidayah yang selalu menyemangati, menasihati, dan mendoakan kebaikan untuk kami anak-anaknya. Kepada saudara kembarku Wika Fitriana Purwaningtyas dan adikku M. Fathu Bahril Falah.
10. Kepada Keluarga Besarku yang ada di Lampung Tengah dan Jepara.

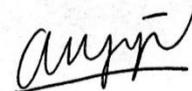
11. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan kita ini.
12. Kepada teman-temanku, Nydia Alzena, Fauziah Agustina, Oktaviana, Zahirotuz Zakiyah, Putri Aisyah, Daniya, Cut Mutiara yang telah menemani, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teruntuk Pak Yai dan Bu Nyai Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo serta para Ustadz Ustadzah yang sudah memberikan ilmu sebegitu dalamnya bagi penyusun, Semoga Allah menempatkan beliau-beliau di syurga tertinggi-Nya Aamiin.
14. Serta kepada Semua pihak yang tak henti menyemangati, dan memberi nasihat kepada penulis selama perjalanan menuntut ilmu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 23 Februari 2022

22 Rajab 1443 H

Penulis



(Anggi Fitriani Purwaningrum)

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TEORI *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH*..... 18

A. Tinjauan <i>Good Governance</i>	18
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	19
2. Asas-Asas <i>Good Governance</i>	20
3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i>	26
B. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	29
1. Definisi <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	29
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	32
3. Kedudukan <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	35
4. Kehujjahan <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	37

BAB III PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG

TENGAH	39
A. Tinjauan Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah	39
B. Tinjauan Umum Pemilu	45
1. Definisi Pemilu dan Dasar Hukum Pemilu	45
2. Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu	49
C. Prosedur Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah	50
1. Tahapan dan Program Kegiatan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah Dalam Pemilu 2019	50
2. Bentuk Pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah Dalam Pemilu 2019	55

3. Kendala dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah	57
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	64
A. Analisis Konsep <i>Good Governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Tengah	64
B. Analisis Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu 2004 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarah demokrasi di tanah air ini, ada pasang surut pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.¹ Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah², Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.³

Kabupaten Lampung Tengah termasuk daerah yang melaksanakan pemilu 2019, dimana dalam kurun waktu satu hari pemilu di Indonesia menjalankan lima pemilihan secara bersamaan yaitu pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adanya pemilu seperti ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara, karena untuk pertama kalinya dalam pemilu mereka menangani lima kertas suara sekaligus dengan waktu perhitungan satu hari

¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm. 65.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

³ Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, "Sejarah Lampung Tengah," <https://web.lampungtenghkab.go.id/sejarah-singkat>, akses 22 September 2021.

yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi waktu perhitungan ditambah menjadi satu hari plus 12 jam.⁴

Dibalik suksesnya pelaksanaan pemilu di tiap-tiap daerah, terdapat berbagai upaya yang dilakukan lembaga pelaksana pemilu yang tentu dalam pelaksanaannya tidak keluar dari aturan yang berlaku dengan kata lain *on the track*. Dari hasil wawancara bersama Ibu Siti Marfuah Darojati, S.Pd. selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pemilu 2019 seperti kondisi geografis, masyarakat asli yang sulit menerima perubahan, dan praktik politik uang yang sulit hilang di masyarakat.⁵

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat gambaran bahwa ada beberapa kendala pada pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implementasi asas tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan⁶. *Good governance* merupakan suatu kondisi dimana terdapat proses kesejajaran, kohesi atau hubungan yang erat, serta keseimbangan

⁴ BBC News, "Pemilu 2019: Pemungutan Suara Indonesia paling 'rumit' dan 'Menakutkan' di Dunia," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia47879833.amp>, akses 11 Januari 2022.

⁵ Wawancara bersama Ibu Siti Marfuah Darojati, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 10.00.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

peran dan adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*).⁷

Dalam pemilu selain ditinjau menggunakan asas *good governance* atau hukum konvensional, pemilihan umum juga dapat ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang diistilahkan dengan *siyasah syar'iyah*, yaitu konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat.⁸ Al-Qur'an mengemukakan empat prinsip yang menjadi dasar pemerintahan dalam sistem politik, prinsip tersebut yaitu: amanat, keadilan, ketaatan (disiplin), musyawarah dengan referensi Al-Qur'an dan Sunnah.⁹ Selain menggunakan konsep *good governance* penulis juga menggunakan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam menganalisis pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi konsep *good governance* dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah?

⁷ Yudhi Supriadi, "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau," eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, Februari 2015, hlm 53.

⁸Nasaruddin Umar, "Mengenal Siyasah Syar'iyah," <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syar'iyah>, akses 20 September 2021.

⁹ Arlis, "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam," Vol. 10 No. 2, Desember, 2011, hlm. 178.

2. Apakah pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi konsep *good governance* dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian prinsip *siyasah syar'iyah* dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan serta menjadi pedoman atau petunjuk bagi pihak yang hendak mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara pada umumnya,

dan lebih khususnya pelaksanaan pemilu yang sejalan dengan konsep *good governance* dan prinsip *siyasah syar'iyah*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi contoh bagi pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab menjalankan suatu kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian, maka dari itu upaya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan telaah pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah dilakukan penelusuran terkait “Analisis Konsep *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu:

Pertama, tesis Irinna Ika Wulandari dengan judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Good Governance* Dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga”. Tesis ini menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga khususnya terkait larangan-larangan dalam kampanye. Tujuan adanya Undang-Undang pemilu tersebut untuk mencegah hal-hal yang merugikan salah satu pihak peserta pemilu dan untuk menjauhkan dari perbuatan yang membawa keburukan. Selain itu terdapat penjelasan mengenai relevansi PKPU Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap *good governance* dan *siyasah dusturiyyah*.¹⁰ Dalam tesis ini tidak membahas mengenai prinsip *siyasah syar'iyah*.

Kedua, skripsi Andi Rezky Aulia Pratiwi dengan judul “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyasah Syar'iyah*)”. Skripsi ini membahas pemilukada dalam sistem demokrasi yang berangkat dari kedaulatan rakyat dimana dalam *siyasah syar'iyah* disebut dengan kesepakatan umat yang jika dilihat dari segi falsafah dasar, prinsip dan tujuan dalam pemilukada dalam sistem demokrasi saat ini dengan pemilukada demokrasi berdasarkan *siyasah syar'iyah* sangatlah berbeda. Hal ini karena pemilukada sistem demokrasi didasarkan pada demokrasi itu sendiri, sedangkan pemilukada demokrasi berdasarkan *siyasah syar'iyah* didasarkan pada akidah Islam.¹¹ Skripsi ini menganalisis pelaksanaan pemilukada dan tidak membahas asas *good governance*.

¹⁰ Irinna Ika Wulandari, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Good Governance* Dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).

¹¹ Andy Rezky Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyasah Syar'iyah*),” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Ketiga, skripsi Ahmad Annizar dengan judul “Analisis *Siyasah Syar’iyah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”. Skripsi memaparkan kesesuaian pelaksanaan pilkada di Desa Kotasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Pilkada ditinjau dari analisis *siyasah syar’iyah* dapat dibenarkan sebab pemilihan didasarkan pada musyawarah sistem. Tetapi dalam proses kampanye di Desa Kotasan sendiri masih kerap terjadi konflik, yang mana ini merupakan perbuatan *mudharat* yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹² Skripsi ini menganalisis pilkada dan tidak membahas asas *good governance*.

E. Kerangka Teori

Penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*).¹³ Untuk itu penulis menggunakan dua kerangka teori dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Teori *Good Governance*

¹² Ahmad Annizar, “Analisis *Siyasah Syar’iyah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

¹³ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (cet. Ke-4; Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 52.

Istilah *good governance* berasal dari induk Bahasa Eropa Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh Bahasa Inggris menjadi *govern* yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah).¹⁴ Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau pemerintahan dengan kewenangan.¹⁵ *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep dalam membentuk suatu proses perencanaan, pelaksanaan serta pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah (*state*) dan warga negara (*citizen* atau *society*).¹⁶

Dalam mewujudkan konsep tata pemerintahan yang baik dibutuhkan asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB adalah asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷ AUPB yang dimaksud meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak

¹⁴ Anita, "Pengertian *Good Governance* Menurut Para Ahli Secara Lengkap," <https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/>, akses pada 30 Oktober 2021.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipasi untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia," *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4, November 2019, hlm. 624-625.

¹⁷ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.¹⁸

Budi Wiyoto mengatakan “*good*” dalam *good governance* mengandung dua pengertian yaitu: *pertama*, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara, berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan keberlanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional. *Good governance* mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.¹⁹

2. Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendekatan *siyasah syar’iyyah* sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Secara etimologi *siyasah syar’iyyah* berasal dari kata *syara’a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar’i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar’i* sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti

¹⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Arif Darmawan Setya, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemilu Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara), Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016).

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁰

Islam sebenarnya merupakan pelayanan utama pemerintahan yang disebut dengan istilah amar makruf sebab pelayanan itu positif sifatnya maka harus ditunjukkan kepada masyarakat yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan hasil yang positif. Sebaliknya jika pelayanan ditunjukkan kepada hal yang negatif maka akan menghasilkan hal yang negatif atau yang disebut dengan fasik.²¹

Menurut para fuqaha *siyasah syar'iyah* berarti berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan sebagai ulil amri (penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak ditentukan oleh syari'ah. Atas dasar ini segala kebijakan yang akan membawa orang lebih dekat kepada *shalah* (kebaikan dan kecocokan dalam hidup) dan menjauhkan orang dari *fasad* (semua yang merusak) berarti telah melakukan *siyasah* (kebijakan) yang adil, sekalipun tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.²²

Menurut Abdurrahman Taj *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-

²⁰ Ahmad Annizar, "Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022," Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018), hlm. 89.

²¹ Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.159.

²² Arlis, "*Siyasah Syar'iyah* Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam," Vol. 10, No. 2, Desember 2011, hlm. 173.

dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²³

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.²⁴ Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁵ Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber yang ditentukan secara *random sampling*,²⁶ Penelitian *random sampling* yang digunakan dalam memilih narasumber yang ditetapkan langsung oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

²³ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 46.

²⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Gresindo, 2010), hlm.5.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar- Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 58.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107.

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif-analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek data pada pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik pemilu di Lampung Tengah pada tahun 2019 serta upaya KPU Lampung Tengah dalam menyukseskan pemilu 2019 yang kemudian dianalisis melalui konsep *good governance* dan ditinjau menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat kenyataan hukum dan interaksi di dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

²⁷ Ronny Hantijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.3.

Bahan data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada narasumber yang bertanggung jawab serta berwenang mengenai topik penelitian. Wawancara dilakukan bersama bersama Bapak Irawan Indrajaya, S.K.M selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah, Ibu Siti Marfuah Darojati, S.Pd selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dan Bapak Hanapiah selaku anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi Nasional Demokrat (NasDem).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai (6), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara, dan beberapa PKPU yang mengatur tentang Pemilu serentak 2019. Selain itu, terdapat juga buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, artikel yang tentunya berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang dicari pada penelitian ini adalah data terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *good governance* serta ditinjau dari sudut pandang prinsip *siyasah syar'iyah*. Adapun data tersebut dicari menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian.²⁸ Atau dapat dikatakan sebagai proses pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan yaitu dengan menggali informasi atau mewawancarai Bapak Irawan Indrajaya, S.K.M selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah, Ibu Siti Marfiah Darojati, S.Pd. selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,

²⁸ Zakky, "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]," <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>, akses 13 Februari 2022.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.136.

dan SDM, dan Bapak Hanapiah selaku anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Dalam proses ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi yaitu: pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁰ Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab mengalir antara narasumber yang kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, dan video yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi yang digunakan di penelitian ini beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pemilu serentak 2019, data-data pemilu 2019 yang tersedia di website KPU Lampung Tengah serta gambar dan video terkait tahapan pemilu 2019 yang terunggah di sosial media KPU Lampung Tengah.

³⁰ Nurul Zuriah, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.166.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dari penelitian bukan berupa angka, melainkan kata-kata verbal.³¹ Penggambaran keadaan fenomena yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dalam bentuk kata guna memperoleh kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan pada skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang mana penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah yang merupakan gambaran awal dari permasalahan yang menjadi sebab diangkatnya judul pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai referensi yang membantu memberikan gambaran mengenai metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian sebelumnya, selanjutnya kerangka teori sebagai pisau analisis, lalu metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas secara mendalam mengenai teori yang akan digunakan yaitu teori *good governance* dan *siyasa syar'iyah*.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, Cet-3, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm.139.

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah. Yang diawali dengan tinjauan umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah, tinjauan umum pemilu, kemudian prosedur pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah termasuk didalamnya tahapan pemilu, program kegiatan, bentuk pelayanan, serta kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu 2019.

Bab *keempat*, bab analisis yang memuat hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan ditinjau menggunakan teori *good governance* dan *siyash syar'iyah*.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan atas permasalahan yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota Legislatif yang didasarkan dari hasil suara rakyat sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan pemerintahan. Pemilu tahun 2019 berbeda daripada pemilu tahun-tahun sebelumnya, dimana dalam pelaksanaannya pemilu 2019 melakukan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota Legislatif secara serentak, yang mana pada pemilu sebelumnya dilakukan secara terpisah. Pelaksanaan Pemilu merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah sesuai dengan asas-asas *good governance* yang didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun perlu ditekankan kembali pada asas keterbukaan dan pelayanan yang baik. Selain itu, dari pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang dianalisis menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah* dalam prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa KPU Lampung Tengah dalam tugasnya sudah sejalan dengan prinsip amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Namun dalam prinsip amanat, KPU belum memenuhi karakteristik prinsip amanat yang ideal, yang mana perlu ditekankan kembali pada aspek keterbukaan dan pelayanan. Adanya

kendala dan permasalahan di dalam pelaksanaan pemilu 2019 merupakan hal yang bisa dimaklumi, mengingat bahwa untuk pertama kalinya pemilu dilakukan secara serentak dan secara umum dapat terselenggara dengan baik dan sukses. Selain itu, KPU Provinsi Lampung sudah melakukan rapat koordinasi evaluasi pemilu serentak 2019 sebagai bahan tinjauan bagi pelaksanaan pemilu serentak periode selanjutnya.

B. Saran

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemilu 2019 sudah sangat baik, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur terkait pelaksanaan pemilu 2019. Namun, perlu ditekankan kembali mengenai beberapa kelengahan yang dilakukan KPU Lampung Tengah terkait keterbukaan dan pelayanan publik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPD RI/V/2018-2019 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019.

3. Jurnal

Andi Saputra Hasugian, “Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Desa Di Kecamatan Mandau Dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2015,” Vol. 4, No. 1, Februari 2017.

Arlis, “Siyasah Syar’yah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam,” Vol. 10, No. 2, Desember 2011.

Firman Hidayat dan Akhmad Khisni, “Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris,” Vol. 4, No. 4, Desember 2017

Irwantoni, “Peranan *Siyasah Syar’iyyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama”, Vol. 10, No. 3, Januari 2012.

Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipasi untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, November 2019.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.

Nike K. Rumokoy, "Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintah," Vol. 27, No. 3, Agustus 2010.

Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintahan, Vol. 2 No. 3, Agustus 2019.

Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam," Vol. 12, No. 1, Maret 2012.

Yudhi Supriadi, "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau," eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, Februari 2015.

4. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.136.

Jafar, Usman. *Fiqih Siyasah*, Cet ke-1 Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Marbun, Sf. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2013.

Pahrudin, Agus. dan Mansyur Hidayat, *Budaya Lampung & Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan*, (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2007), hlm. 2.

Prakoso, Abintoro. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Gresindo, 2010.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet ke-4 Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumitro, Ronny Hantijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015.

Syafie, Inu Kencana. *Etika Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Syarif, Mujar Ibnu. dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Zuriah, Nurul. *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

5. Website

Ahmad Ahyar, "Lima Warna Surat Suara di Pemilu 2019, Apa Maksudnya?" <https://www.google.co.id/amp/s/akuratnews.com/5-warna-kertas-suara-di-pemilu-2019-apa-maksudnya//amp/> akses 14 Februari 2022.

Ahmatfaury, “Peranan Siyasah Syariah Dalam Pembinaan Hukum Nasional”, <http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/155/peran-an-siyasah-syariah-dalam-pembinaan-hukum-nasional.html> , akses 21 Januari 2022.

Anita, “Pengertian Good Governance menurut para ahli secara lengkap,” <https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/>, akses 30 Oktober 2021.

BBC News, “Pemilu 2019: Pemungutan suara Indonesia paling ‘rumit’ dan ‘menakutkan’ di Dunia,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia47879833.amp> , akses 11 Januari 2022.

Cekli Setya Pratiwi, dkk. , “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf> , akses 13 Januari 2022.

Edelweis Lararenjana, “Tujuan Pemilu di Indonesia Beserta Pengertian dan Fungsinya, Wajib Diketahui,” <https://m.merdeka.com/jatim/tujuan-pemilu-di-indonesia-beserta-pengertian-dan-fungsinya-wajib-diketahui-klm.html> akses 12 Februari 2022.

Hafidz Abdurrahman, “Thariqah dan Uslub Untuk Memenangkan Islam,” <http://www.dakwahjateng.net/2018/04/thariqah-dan-uslub-untuk-memenangkan.html?m=1> akses 14 Februari 2022.

IDalamat, “Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah,”

<https://idalamat.com/alamat/31475/komisi-pemilihan-umum-kpu-kabupaten-lampung-tengah> akses 12 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cermat.html>, akses 22 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/prinsip.html> akses 22 Januari 2022.

KPU Lampung Tengah, “Visi Misi,” <https://kab-lampungtengah.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi> , akses 27 Januari 2022.

Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur, “KPU Lampung Timur Mengikuti Rakor Evaluasi Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Serentak Tahun 2020,” <http://kpu-lampungtimurkab.go.id/kpu-kabupaten-lampung-timur-mengikuti-rakor-evaluasi-pemilu-2019-dan-pemilihan-serentak-tahun-2020/> , akses 23 Februari 2022.

Kupastuntas.co, “ KPU Lampung Tengah Gelar Pemilu Run 2019,” <https://kupastuntas.co/2019/04/07kpu-lampung-tengah-gelar-pemilu-run-2019>, akses 9 Februari 2022.

Nasaruddin Umar, “Mengenal *Siyasah Syar’iyah*,” <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah> , akses 20 September 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, “Gambaran Umum,”
<https://web.lampungengahkab.go.id/gambaran-umum> akses 29
Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, “Sejarah Lampung Tengah,”
<https://web.lampungengahkab.go.id/sejarah-singkat>, akses 22
September 2021.

Prokomsetda, “Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di
Indonesia,”
<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
akses 11 Februari 2022.

Rais Martanti, “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum
Administrasi Negara”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>
akses 17 Januari 2022.

Rinda Faradilla, “Good Governance: Pengertian, Tujuan dan
Manfaatnya”,<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rinda-faradilla/apa-itu-good-governance/5> , akses 21 Januari 2022.

Sayap Bening Law Office, “Pengertian Pemilu,” <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu#> akses 27 Januari 2022.

Syawier, “ Konsep Siyasaah Syariyyah dan Pelaksanaannya”,
<http://musyawwir5275.blogspot.com/2017/04/konsep-siyasaah-syariyyah-dan.html?m=1> akses 23 Januari 2022.

Yhouga Pratama, “Wajibnya Bai’at Kepada Ulil Amri,”
<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>
akses 14 Februari 2022.

Zakky, “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap],” <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>
akses 13 Februari 2022.

6. Lain-Lain

Ahmad Annizar, “Analisis Siyasaah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

Andy Rezky Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyasaah Syar’iyah*),” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Arif Darmawan Setya, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara), Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016).

Bawaslu Lampung Tengah, “Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019,” hlm. 89.

Irinna Ika Wulandari , “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Good Governance* Dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).

M.Satriawan, “Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram (2019).

Observasi, Letak Geografis KPU Lampung Tengah, 12 Februari 2022.

Wawancara bersama Bapak Hanapiah selaku anggota DPRD Lampung Tengah fraksi NasDem pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 16:32.

Wawancara bersama Bapak Irawan Indrajaya, S.K.M selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah pada 20 Februari 2022, pukul 10.30.

Wawancara bersama Ibu Siti Marfuah Darojati, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 10.00.